

Pandangan Umum Dan Islam Dalam Menghadapi Kemiskinan

General Views And Islam In Dealing With Poverty

Riswan Rambe^{a,1}, Jeroh Miko^{b,2}, Regina Septiani^{c,3}

^{a,b}Dosen Tetap Universitas Potensi Utama Medan; Jl. K1 Yos Sudarso, (061) 6640525

^cMahasiswa Universitas Potensi Utama Medan; Jl. K1 Yos Sudarso, (061) 6640525

riswanrambe93@gmail.com¹, jerohmiko70@yahoo.com², reginaseptianiseptiani@gmail.com³

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji masalah kemiskinan dan kelaparan. Hal ini memerlukan analisis yang tepat untuk melihat komponen dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Metode dan strategi untuk memecahkan beberapa masalah umum dan khusus program diterapkan. Menganalisis hasil berbagai kebijakan dan tindakan pengentasan kemiskinan. Sebagian besar program anti-kemiskinan pemerintah gagal karena implementasi yang tidak konsisten. Seperti di banyak negara lain seperti Amerika Serikat, pendekatan dan fokusnya berbeda, tetapi Indonesia berusaha. Selanjutnya, penekanannya adalah pada sudut pandang ekonomi, bukan agama. Kesalahan model ini dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis dan penghilangan variabel penting, yang menyebabkan perkiraan dan hasil yang tidak diharapkan. Studi ini juga mengkaji strategi dan dasar pengentasan kemiskinan yang tepat untuk implementasi yang lebih baik.

Kata Kunci : Ekonomi kerakyatan, Strategi Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRACT

This paper examines the issue of poverty and poverty. This requires proper analysis to consider the components and problems found in this area. Methods and strategies for solving some commonly and specifically run program problems. Analyze the results of various policies and measures to reduce poverty. Most government anti-poverty programs fail due to inconsistent implementation. As in many other countries, such as the United States, the approach and focus is different, but Indonesia is trying. In addition, the focus is on an economic perspective rather than religion. These paradigmatic errors can lead to analytical errors and omission of important variables, leading to unexpected estimates and results. This study also examines poverty reduction strategies and the appropriate basis for better implementation.

Keywords: Populist economy, Poverty Alleviation Strategy

Info Artikel :

Disubmit: 8 November 2020

Direview: 15 Desember 2020

Diterima: 25 Januari 2021

Copyright © 2021 – AL-QASD Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Konsep dan kondisi kemiskinan sering dikacaukan dan diidentikkan dengan konsep dan kondisi keterbelakangan. Meskipun keduanya adalah konsep yang berbeda. Keterbelakangan adalah proses dialektis (kausal). Kemiskinan tidak serta merta memperlambat pertumbuhan dan tidak memperlambatnya.

Di sisi lain, keterbelakangan seringkali meningkatkan kemiskinan. Negara berkembang identik dengan negara miskin. Pengurangan kemiskinan merupakan upaya pembangunan yang penting di negara-negara tersebut. Namun, seperti Kunarjo (2000, 2-3), menurut Ragnar Nurske menyerupai Kemiskinan dan lingkaran setan di negara berkembang. Pendapatan rendah tidak hanya menyebabkan tabungan yang lebih

¹ Dosen tetap ekonomi syariah di UPU

² Dosen tetap ekonomi syariah di UPU

³ Mahasiswa UPU T.A 2016

rendah, tetapi juga tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah, yang menurunkan produktivitas sumber daya yang tersedia. Semua ini juga berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat (Kunarjo, 2000, 3). Lingkaran setan ini dapat direpresentasikan secara skematis sebagai berikut:

Salah satu taktik paling umum yang digunakan birokrat untuk melawan LSM adalah membantu orang miskin. Strategi ini bisa dikatakan bermula setelah John Maynard Keynes menasihati pemerintah AS pada masa Great Depression tahun 1930-an. Salah satu gagasan Keynesiannya, yang bahkan diklaim oleh banyak orang sebagai intinya, adalah dia percaya bahwa ekonomi tumbuh dan berkembang secara alami berkat "tangan tak terlihat" yang disebut kepentingan pribadi. Tujuannya adalah untuk menentang sekolah klasik. Meskipun rekomendasi utama tidak secara langsung menyangkut subsidi bagi masyarakat miskin, namun mereka menekankan pentingnya intervensi negara sebagai pelaku ekonomi di masa-masa sulit dan ketika mekanisme tangan tak terlihat gagal.

Gagasan intervensi negara (langkah-langkah ekonomi) dalam pembangunan oleh Keynes dan sejenisnya melahirkan konsep negara baru, negara kesejahteraan. Dahulu, negara secara efektif hanya berperan sebagai pengawas atau watchdog, dan pengusaha perorangan (baca: kapitalis) beroperasi dengan sedikit atau tanpa aturan. Negara kesejahteraan didasarkan pada gagasan Keynesian yang mengarah pada pembentukan Bank Dunia dan IMF sebagai bagian dari strategi negara kesejahteraan.

Ide dasar dari negara kesejahteraan adalah mengambil dari mereka yang memiliki dan memberi kepada mereka yang tidak memiliki. Tentang apa yang disebut "dukungan". Konsep ini juga merupakan bagian dari mekanisme Marshall Plan untuk merekonstruksi Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Konsep negara kesejahteraan mirip dengan konsep ekonomi sosialis (non-komunis) yang dikemukakan oleh ekonom Mohammad Hatta pada masa kemerdekaan Indonesia.

Hatta meletakkan dasar bagi perekonomian Indonesia, yaitu. koridor ekonomi sosialis atau model negara sosial. Perekonomian harus berjalan dengan adil. Perbedaannya adalah ekonomi sosialis mewakili peran aktif (atau lebih aktif) pemerintah dalam membangun keadilan ekonomi, sedangkan negara sosialis memiliki peran pasif dan aktif dalam membangun keadilan ekonomi. untuk mewakili peran pemerintah.

Perkembangan tersebut menjadikan konsep kesejahteraan nasional sebagai pilihan pembangunan di Indonesia, khususnya pada era Orde Baru (era Presiden Soeharto). Pilihan itu memang disengaja karena arah pembuat kebijakan saat itu lebih ke Amerika daripada Eropa (Barat). Basis politik adalah legitimasi kapitalisme.

Namun secara ekonomi ada mekanisme untuk mengurangi efek kapitalisme dalam bentuk subsidi. Beasiswa menjadi penyelamat bagi perkembangan Orde Baru. Dukungan luar biasa :

1. Dukungan perbankan atau birokrasi untuk kredit mikro.
2. Hibah Pendidikan.
3. Subsidi kesehatan, subsidi BBM dan.
4. Subsidi pertanian.

Kita dapat menyebut model ekonomi orde baru sebagai model ekonomi kapitalis yang digantikan oleh dukungan ini. Rakyat teralienasi dari ekonomi kapitalis. Mengingat kelompok miskin mencapai satu juta orang, maka dapat dikatakan metode pendampingan tersebut sangat efektif. Pada tahun 1996 hanya 1% orang yang dilaporkan hidup di bawah garis kemiskinan dan kecenderungannya adalah . Premisnya sederhana, pertumbuhan ekonomi yang cepat menyisakan celah, dan celah itu bisa diisi dengan subsidi. Nyatanya, "goresan" bukanlah lecet, melainkan "bekas luka abadi". Ketika obatnya dicabut, lukanya terbuka, memicu ledakan politik yang menjadi salah satu bahan bakar krisis domestik pada tahun 1998. Ini tentang membantu orang miskin lagi, tolong angkat bicara. Bahkan hari ini mereka berbicara tentang

membantu orang miskin. Untuk membuat rekomendasi terbaik, kita perlu memahami perubahan paradigma pembangunan saat ini, bagaimana seharusnya subsidi diatur, dan bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dirumuskan dan dilaksanakan.¹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif penelitian kepustakaan yang menyasar buku-buku berjudul sama, jurnal ilmiah, dan perpustakaan penelitian lainnya. Subyek penelitiannya adalah seorang peneliti, namun bagaimana ia bisa melihat informasi headline melalui buku, penelitian ilmiah dan media informasi lainnya? Penelitian ini menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Peneliti mewawancarai beberapa peneliti yang mengetahui judul ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Angka Kemiskinan Indonesia

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak berada di pedesaan daripada di perkotaan. Dari tahun 1996 hingga 2005, jumlah dan proporsi penduduk miskin berfluktuasi setiap tahun, meskipun antara tahun 2000 dan 2005 jumlah penduduk miskin meningkat 13 juta orang antara tahun 1996 dan 1999.

Serentak. Pada periode 1999-2002, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 9,57 juta, dari 7,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,0 juta pada tahun 2002. Angka kemiskinan menurun dari 23,3% pada tahun 1999 menjadi 18,20% pada tahun 2002. . . Pada tahun 2002-2005, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3,3 juta orang. yaitu dari 38,0 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005.

Angka kemiskinan turun dari 18,20% pada tahun 2002 menjadi 15,97% pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret mencapai 6,0 juta jiwa. (17,75 persen). Dibandingkan dengan 35,10 juta (15,97%) yang hidup dalam kemiskinan pada Februari 2005, ini berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat sedikit lebih banyak dibandingkan di perkotaan.

Dari Februari 2005 hingga Maret 2006, jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat menjadi 2,06 juta, dibandingkan dengan 1,89 juta di perkotaan. Hubungan antara kaum miskin perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada Februari 2005, mayoritas (6,67%) penduduk miskin tinggal di pedesaan; pada Maret 2006, pangsa pasar mereka sedikit turun menjadi 63,1% (News Official Statistics, 2006).

B. Paradigma Yang Salah

Program pengentasan kemiskinan yang diterapkan pemerintah sejauh ini gagal memenuhi harapan. Pada tahun 2005, Huriyati menjelaskan kesalahannya dengan beberapa model seperti:

- 1) Tekankan aspek ekonomi dan bukan aspek multifaset. Memerangi kemiskinan dari perspektif ekonomi terbukti gagal karena memerangi kemiskinan dari perspektif ekonomi tidak merepresentasikan masalah kemiskinan yang sebenarnya dalam konteks budaya.
- 2) Welas asih (kecerahan) atas produktivitas. Pengentasan kemiskinan hanya didasarkan pada memberi, bukan mendorong orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Anda selalu bergantung pada bantuan orang lain. Memang, program pengentasan kemiskinan harus bertujuan untuk menjadi produktif.
- 3) Perlakukan orang miskin sebagai objek, bukan subjek. Beberapa di antaranya disengaja. Aktor

perubahan terlibat aktif dalam kegiatan program untuk memerangi kemiskinan. Pemerintah tetaplah penguasa, bukan promotor. Dalam mengatasi kemiskinan, negara masih berperan sebagai penguasa dan seringkali terlalu ikut campur dalam kehidupan masyarakat miskin. Sebaliknya, negara harus bertindak sebagai promotor yang tugasnya adalah mengeksplorasi potensinya.

- 4) Kelemahan dari pendekatan-pendekatan di atas memerlukan perubahan dalam fokus pengkajian kemiskinan, khususnya yang berkaitan dengan kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan.
- 5) Kajian Ekonomi Rakyat memiliki 13 indikator kunci kemiskinan. (1) keterbatasan pasokan dan kualitas pangan; (2) Akses terhadap pelayanan kesehatan terbatas dan berkualitas buruk. (3) Ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan terbatas. (4) terbatasnya kesempatan kerja dan usaha; (5) lemahnya perlindungan aset perusahaan dan ketimpangan upah; (6) Terbatasnya akses ke perumahan dan sanitasi. (7) Terbatasnya akses terhadap air minum. (8) Tingkat kepastian hak guna dan pengelolaan tanah rendah. (9) Kerusakan lingkungan dan sumber daya alam membatasi kemampuan masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam. (10) Saya tidak merasa aman. (11) Tingkat partisipasi rendah. (12) Beban penduduk akibat struktur keluarga besar. (13) Pemerintahan yang lemah menyebabkan pelayanan publik yang tidak efisien dan efisien, korupsi yang meluas dan rendahnya tingkat perlindungan sosial di masyarakat.⁴

C. Kegagalan Mengatasi Kemiskinan

Selama ini pemerintah pusat yang diwakili oleh BAPPENAS fokus pada pengentasan kemiskinan dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan pinjaman kepada Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejak tahun 1970-an, kebijakan pembangunan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat telah memusatkan semua proyek pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan dan beberapa kota. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat melaksanakan program-program berikut.

Mengurangi dukungan kredit, jaminan usaha dan pengadaan peralatan, infrastruktur desa kerajinan seperti PUSKSMAS, INPRES, KUD, dll.

- 1) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan membagi kebutuhan sehari-hari yang dibagikan secara gratis kepada fakir miskin.
- 2) Temukan layanan medis yang tepat dengan mengirimkan paramedis ke desa-desa dan dapatkan obat-obatan melalui program PUSKESMAS

Masyarakat miskin telah menerima bantuan dari program penanggulangan kemiskinan tetapi belum mencapai hasil yang diharapkan. Mempertimbangkan beberapa kesalahan pengentasan kemiskinan yang disebutkan di atas, strategi pengentasan kemiskinan berikut harus diterapkan. Pertama, karena kemiskinan merupakan masalah multifaset. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan hendaknya tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga mengutamakan aspek lainnya.

Kedua, strategi yang dipilih untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas akan membantu masyarakat miskin melalui langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan pendidikan, meningkatkan keterampilan bisnis dan teknologi, serta memperluas konektivitas dan kecerdasan pasar. Ini adalah untuk meningkatkan keterampilan penggalangan pendapatan dasar

Ketiga, masyarakat miskin berpartisipasi dalam proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari

⁴. Ulja, Husna Nimatul. "Model Kemiskinan dalam Perspektif dan Tradisi Islam". Dari Barcelona: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam 1.1 (2018): 129-153.

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi dan pengambilan keputusan.

Keempat: strategi pemberdayaan. Kelompok Populisme Pertanian yang dipimpin oleh sekelompok pakar dan aktivis LSM menegaskan bahwa masyarakat miskin merupakan kelompok yang dapat berkembang jika pemerintah ingin memberikan kebebasan kepada kelompok tersebut untuk mengatur dirinya sendiri.³

D. Strategi Mengatasi Kemiskinan

Pemahaman tentang kemiskinan dan upaya penanggulangannya sangat menarik untuk disimak. Menurut teori ekonomi, itu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang masalah ini di antara semua pemangku kepentingan, Mereka memainkan peran yang tepat dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan kemiskinan dan meningkatkan akuntabilitas program. Kreativitas dapat memutus siklus kemiskinan.

Secara umum, program kemiskinan strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Terbukanya peluang dan peluang usaha bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.

Kebijakan dan program untuk memberdayakan masyarakat miskin. Kemiskinan bersifat multidimensional, namun hanya mengandalkan pendekatan ekonomi saja tidak cukup juga⁵ bergantung pada kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan lembaga bidang.

Orang miskin dan kebijakan serta program yang melindungi orang miskin sangat sensitif terhadap gangguan internal (misalnya kematian rumah tangga, sakit, hari libur). dan eksternal (misalnya pengangguran, bencana alam). Bencana (konflik) karena pemogokan ini tidak memiliki daya tahan atau jaminan.

Selama 30 tahun terakhir, layanan makanan, kesehatan dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan pertanian, alokasi modal kerja melalui sistem kredit, pembangunan dan dukungan infrastruktur dan konsultasi sanitasi. Karena semua strategi pengentasan kemiskinan digerakkan oleh konten, kelanjutannya sangat bergantung pada ketersediaan dana anggaran dan komitmen pemerintah.

E. Pandangan Islam dan Solusi Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Zakat dalam Islam merupakan alat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini, ZISWAF dan khususnya zakat nampaknya menjadi alat yang penting dan langgeng. Zakat sebagai alat pembangunan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal tradisional saat ini (lihat Zakat sebagai alat pembangunan ekonomi daerah) oleh Mustafa Edwin Nasution).

Pertama, penggunaan zakat secara jelas didefinisikan dalam syariat (QS. Taubah: 60) dimana zakat hanya berlaku untuk 8 golongan (ashnaf), yaitu: Fakir, miskin, Amil, Mu'allaf, budak, berhutang, Jihad Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa tidak sah menerima zakat kecuali 8 golongan tersebut.

Kedua, itu tidak pernah berubah karena diatur oleh keadaan. Misalnya, zakat yang banyak digunakan, seperti B. Zakat komersial, hanya 2,5%. Tidak ada yang dapat menggantikan atau mengubah aturan ini. Oleh karena itu, penerapan zakat tidak mempengaruhi insentif investasi dan menciptakan transparansi dalam ketertiban umum dan menjamin keamanan komersial. "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari

⁵ HORAY Abu. Strategi Pengentasan Kemiskinan Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2013, 12.1: 3-13

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

Bekerja di sini berarti usaha yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk menghasilkan barang, jasa atau jasa.

1) Orang tua dapat membeli Garansi Seumur Hidup

Meskipun senjata yang paling efektif melawan kemiskinan adalah wirausaha melalui kerja, namun dalam Islam keselamatan orang tua yang miskin tidak kalah pentingnya dengan keselamatan orang tua yang tidak mampu lagi bekerja. Diantaranya ada janda tua yang tidak memiliki harta, anak kecil yang orang tuanya sudah lanjut usia dan lemah, serta ada orang yang selalu sakit dan orang tua yang tidak mampu.

2) Zakat

Tidak semua orang yang menganggur dan pengusaha memiliki kerabat dekat yang dapat mengamankan dan secara finansial mendukung mata pencaharian mereka. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang lemah tanpa orang tua ini? Islam tidak melupakan orang miskin dan yang membutuhkan. Agunan Tunai Syariah (Baitul Mal)

3) Harta Negara Islam

Sebenarnya adalah harta publik yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama, baik secara pribadi, disewakan atau dibagi dengan pihak lain. Contoh: wakaf untuk kepentingan umum termasuk pertambangan dan sumber daya alam lainnya.⁶

Jadi ketika seseorang, dimanapun dan kapanpun, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (utama), yaitu. H. Sandang, Pangan dan Perumahan, dapat digolongkan fakir atau miskin. Oleh karena itu, setiap program rehabilitasi yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin harus menyasar kelompok ini. Atau seseorang memiliki pekerjaan tetapi masih tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar yaitu miskin atau menganggur karena PHK atau alasan lain yaitu kemiskinan. Ketika kemiskinan menjadi ukuran.

Islam dibandingkan dengan standar lain akan menjadi perbedaan yang sangat jelas. Nilai ukuran kemiskinan Islam jauh lebih tinggi daripada ukuran lainnya. Hal ini karena ukuran kemiskinan dalam Islam memiliki tiga aspek untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, yaitu pangan, sandang, dan subsisten. Tolok ukur lain cenderung hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan diet.⁷

Kesetaraan kesejahteraan dan kepentingan rakyat harus diutamakan. Distribusi pendapatan yang adil ini sebenarnya merupakan hambatan utama bagi ekonomi kapitalis. Mereka mengatakan bahwa kekayaan itu seperti air yang dituangkan ke dalam gelas. Saat gelas penuh, air mengalir di sekitarnya. Tetapi mereka lupa bahwa orang yang tidak berharga tidak cukup untuk mendapatkan harta. Ketimpangan ekonomi muncul, ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Inilah salah satu tujuan ekonomi Islam. Ada nilai moral yaitu qonaah, menghindari harta, menghindari keserakahan, tidak menghambur-hamburkan uang. Ada cara penyaluran yang sama dengan zakat, infaq shadaqah. Peran pemerintah (tadakhul dauliyah) adalah melindungi Maqasid dan kepentingan rakyat. Menurut Al-Ghazal, Maqasid Syariah meningkatkan kesejahteraan semua orang berdasarkan perlindungan iman, jiwa, roh, keturunan dan kekayaan mereka. Segala sesuatu yang menjamin kelima hal ini menjamin kebaikan bersama

⁶ Ahyani, S. (2016). Kemiskinan dari perspektif Al-Qur'an dan solusinya dalam visi Islam: Kajian tentang pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi tentang pengentasan kemiskinan. *Majalah Kariman*, 4(1), 43-64.

⁷ Cantika, S.B. (2013). Strategi pengurangan kemiskinan dari perspektif Islam. *Jurnal Inovasi dalam Bisnis dan Ekonomi*, 4 (2), 101-114.

dan kekurangan.”⁸

REFERENSI

- [1] Abdurrahman, Moeslim. 1995. Islam Transformatif, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [2] Abu Bakar, H. 2007. Manajemen Masjid Berbaris II H. Abu Bakar. Yogyakarta :Arina.
- [3] Baswir, Revrisond. 1997. Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta:IDEA.
- [4] Betty, R. Schart. 1995. Kajian Sosiologi Agama. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- [5] Cantika, S. B. (2013). Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4 (2), 101-114
- [6] Chamsyah, Bachtiar, 2003, Dimensi Religi dalam Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Depsos RI.
- [7] Fitriasari, F. (2016).Sinergi Ekonomi Islam untuk Menanggulangi Kemiskinan. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 49-63.
- [8] Hafidhuddin, Didin.(2018) "Islam dan Penanggulangan Kemiskinan." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 : 25-32
- [9] HURAERAH, Abu.(2013) Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12.1: 3-13.
- [10] Mas’udi, Masdar F. 1991. Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [11] Muhammad Muhib Alwi, “Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan ekonomi Masyarakat”, dalam jurnal Al-Tatwir, Vol. 1 Oktober 2015.
- [12] Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- [13] Ulya, Husna Nimatul. (2018) "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1.1: 129-153.
- [14] Setianto dan Tika Widiastuti, “Analisis Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Masjid At-Taqwa”, dalam jurnal JESTT Vol. No. 10 Oktober 2015

⁸ Fitriasari, F.. Sinergi Ekonomi Islam dengan Venki Malriçecon. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), (2016), hal.49